

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Muvita Ayu Anjassari

NPM: 1521020285

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

TAHUN 1440 H/2019 M

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Muvita Ayu Anjassari

NPM: 1521020285

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyah)

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M. Kom.I.

Pembimbing II : Khoiruddin., M.S.I

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1440 H/2019 M



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Tlp (0721) 703260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Kesugihan
Kecamatan Kalianda)**, disusun oleh : **Muvita Ayu Anjassari,**
NPM : **1521020285**, Jurusan : **Siyasah**, telah di Ujikan dalam
sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada
Hari/Tanggal : **Kamis, 2 Mei 2019.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dra. Firdaweri, M.H.I

Sekretaris : Syekh Syarif Hidayatullah, M.H.I

Penguji I : Dr.Hj Zuhraini, S.H., M.H

Penguji II : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung, Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Muvita Ayu Anjassari
Npm : 1521020285
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
**Judul : Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi
di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Susiadi, M.Sos.I.
NIP. 195808171993301002

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

Ketua Jurusan Siyasah

Drs. Susiadi As., M.Sos.I
NIP. 195808171993301002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS: An-nisa (4): 59).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil a'lam, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda M.Muhsin dan Ibunda Elvi Tintamina yang telah setulus hati dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, bimbingan, arahan, motivasi, dan do'a yang selalu di panjatkan di setiap sholatnya.
2. Adikku Muhammad Habib Ma'ruf Al-Fajar, Desi Deviana, Jihan Meidiana Hilmi, yang selalu menemani dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.
3. Ahmad Faisal Pitoni, Devi Damayanti, Reni anggraini yang senantiasa berada disampingku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan *support*, dikala suka maupun duka, selalu menemani dalam penulisan skripsi ini dan selalu mendengarkan keluh kesah selama penyusunan.

RIWAYAT HIDUP

Muvita Ayu Anjassari dilahirkan di Batu Marta IV OKU pada tanggal 21 Agustus 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak M.Muhsin dan Ibu Elvi Titamina.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-kanak di TK Bhina Karya lulus tahun 2002, dan melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 02 Merak Belantung, dan lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan sekolah kejenjang selanjutnya Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Pondok Pesantren Ushuluddin, dan lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Terpadu Ushuluddin, dan lulus pada tahun 2014, selama di pesantren Ushuluddin penulis mendapatkan kepercayaan menjadi ketua organisasi pesantren, sehingga banyak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran selama menimba ilmu di pesantren ushuluddin.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, fakultas Syariah, prodi Siyasah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah saw, beserta keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya.

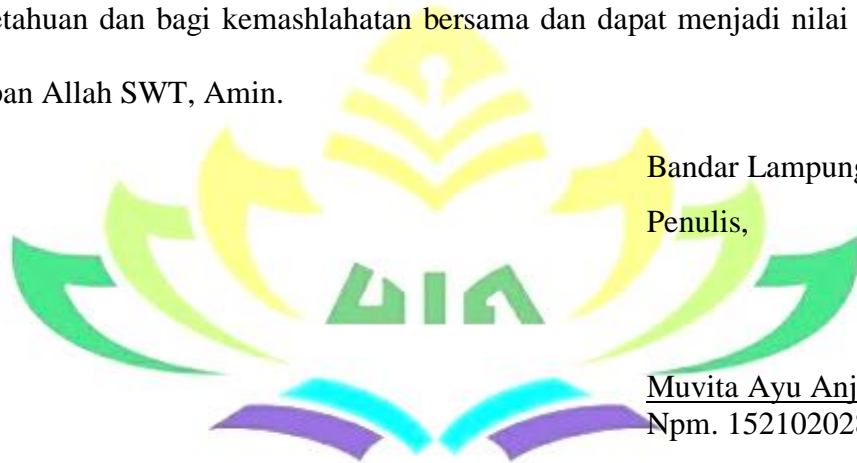
Dalam sirkulasi yang panjang dalam tahap penyelesaian skripsi ini, tentu tidaklah lepas dari dorongan, motivasi dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak hingga terselesainya skripsi ini. Dengan rasa hormat dan banyak ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi, AS., M. Kom. I, selaku ketua jurusan Siyasah dan Frengki, M.S.I selaku sekretaris jurusan (Hukum Tata Negara) di fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. Susiadi, AS., M. Kom. I, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Khoiruddin, M.S.I, selaku pembimbing II sekaligus pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dari semester I hingga di akhir semester ini, sampai terselesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di perkuliahan ini sampai terselesainya penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu memberikan literatur dan referensi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Lembaga Adat desa Kesugihan Kalianda yang telah memberikan izin menjadi tempat penelitian hingga terselesainya skripsi ini.
9. Kosan ketcheh, lulu, Zahra, Yuli, Emi yang tak henti-hentinya memberikan semangat dukungan motivasi dan selalu setia mendengarkan keluhan kesah selama penyusunan skripsi.
10. Para Waria (wanita-wanita ceria), Alfhi, Desi, Tika, Inas, Day, Beby, yang selalu menemani dari awal perjuangan sampai akhir perjuangan baik suka maupun duka dalam penyusunan skripsi.
11. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2015 prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) fakultas Syariah, Alfhi, Desi, Tika, Day, Inas, Beby, Tiar, Esty, Aji, Hardi, Riski, Gustian, Zulfikar, Maysaroh, Diara, Dara, Susi, Via, Nisa, Rahma, Udin, Yunus, Rianda, Raka, Alpian dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak semangat dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, itu semua karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi lading amal dan di terima oleh Allah SWT, dan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi semua pihak dalam upaya perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kemashlahatan bersama dan dapat menjadi nilai ibadah di hadapan Allah SWT, Amin.



Bandar Lampung
Penulis,

Muvita Ayu Anjassari
Npm. 1521020285

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| A. Lembaga Adat | 13 |
| 1. Pengertian Lembaga Adat | 14 |
| 2. Dasar Hukum Lembaga Adat..... | 18 |
| 3. Peran Lembaga Adat dengan Pemerintahan Desa | 20 |
| B. Pemerintahan Desa..... | 25 |
| 1. Pengertian Pemerintahan Desa..... | 25 |
| 2. Dasar Hukum Pemerintahan Desa | 30 |
| 3. Hubungan Pemerintahan Desa dengan Lembaga Adat | 31 |

| | |
|---|-----------|
| C. Hukum Islam..... | 33 |
| 1. Pengertian Hukum Islam..... | 33 |
| 2. Dasar Hukum Islam..... | 37 |
| 3. Metode Hukum Islam..... | 45 |
| BAB III LAPORAN PENELITIAN | 56 |
| A. Gambaran Umum Lembaga Adat Desa Kesugihan kecamatan Kalianda | 56 |
| B. Program-program Lembaga Adat..... | 59 |
| C. Hubungan Lembaga Adat Dengan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..... | 61 |
| D. Peran Lembaga Adat | 64 |
| BAB IV ANALISIS | 70 |
| A. Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan..... | 70 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan..... | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Rekomendasi..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara dengan Kepala adat dan kepala Desa di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda
- Lampiran II : Surat Izin Riset dari Fakultas dan Kesbangpol
- Lampiran III : Kartu Konsultasi Kendali
- Lampiran IV : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran IV : Struktur Kelembagaan Adat Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda dan Skema Pemerintahan Adat Marga



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah; **“Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan).**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan maka perlu adanya penegasan judul, judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut:

Peran yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain sandiwara, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹

Lembaga dalam bahasa Inggris disebut *Institute*, lembaga yang berarti badan organisasi yang bertujuan memenuhi suatu kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1051.

² Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 123.

Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cara yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.³ Istilah adat berasal dari kata-kata Arab yaitu *Adah* atau Adat yang artinya “kebiasaan”, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi yang sudah menjadi kebiasaan.⁴

Penyelenggaraan yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemeliharaan, pemiaraan, proses, cara perbuatan menyelenggaraan di berbagai-bagai arti.⁵

Pemerintahan adalah suatu kegiatan menjalankan pemerintahan atau proses penyelenggaraan pemerintahan (*bestuursvoering*). Kata Pemerintahan berkaitan dengan fungsi pemerintahan atau bagaimana pemerintahan itu dijalankan atau di laksanakan.⁶

Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.⁷

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.8.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 8.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 1251.

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 31.

⁷ Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h. 2.

Perspektif Hukum Islam, perspektif adalah suatu cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.⁸ Sedangkan Hukum Islam adalah syariat atau aturan-aturan yang berdasarkan dari Allah SWT yang ada pada agama Islam baik berupa perintah, larangan ataupun anjuran untuk di jadikan pedoman umat manusia dalam kehidupan yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

Bedasarkan penegasan kalimat diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam (Di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)” adalah menelaah peran dari suatu lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka menjalankan suatu program pemerintahan bedasarkan syariat Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Sebagai lembaga pemerintahan desa, Lembaga Adat sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditinjau dari Hukum Islam.
- b. Meninjau pandangan hukum Islam terhadap peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Alasan Subjektif

⁸ G.setya Nugraha dan R Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), h. 475.

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang Peran Lembaga adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- b. Tersedianya literatur dan sarana yang mendukung penelitian dalam rangka menyelesaikan penelitian ilmiah ini.
- c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 6 PP No.7/2008 menyatakan, (1) pemerintahan dapat memberikan penugasan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu (2) dalam hal kementrian atau lembaga penugasan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari presiden. (3) presiden memberikan persetujuan penugasan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perancangan

pembangunan nasional.⁹ Dalam pasal diatas tertera jelas bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, presiden telah memberikan persetujuan atau mandat yang telah diberikan kepada pejabat pemerintah yang selanjutnya di berikan kepada aparatur desa seperti lembaga adat yang terdapat di desa, khususnya desa Kesugihan kecamatan kalianda kabupaten Lampung Selatan.

Di daerah atau desa suatu pemerintahan akan bersendi permusyawaratan. pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, memposisikan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing yang memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan sistem pemerintahan.

Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal I ayat (1) Desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹⁰

Pemerintahan desa merupakan suatu pemerintahan yang terendah karena desa merupakan suatu pemerintahan dibawah kabupaten dan kota, desa mempunyai otonomi desa yang asli dan utuh, maka pemerintahan juga wajib

⁹ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta 2011), h. 82.

¹⁰ *Op. Cit.*, h.16.

menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, yaitu otonomi yang memiliki adat istiadat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya, agar semua program kerja terlaksana perlu adanya kerjasama antara aparatur desa dengan masyarakat setempat.

Di Indonesia khususnya di provinsi Lampung terdiri dari berbagai suku dan beraneka ragam adat istiadat, dalam berbagai keanekaragaman ini sering dijumpai kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, adanya suatu lembaga adat dalam suatu pemerintahan di desa sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk membentuk kebiasaan masyarakat agar lebih tertuju dan terarah sesuai syariat Islam.

Sebagai bentuk demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau lembaga lain seperti lembaga adat yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa.

Dalam perda provinsi Lampung BAB IV tentang lembaga adat pasal 18 ayat (1) yaitu pemeliharaan kebudayaan lampung juga dilakukan oleh dan atau melalui lembaga adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang

mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum alam yang berlaku.¹¹

Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat, adanya lembaga adat pun untuk menciptakan hubungan yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Lembaga adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat.

Lembaga adat di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda merupakan suatu lembaga yang berperan penting baik urusan adat istiadat, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana lembaga adat yang ada di desa kesugihan sudah sangat berperan dan ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk membentuk desa yang maju perlu adanya kerjasama anantara lembaga-lembaga desa yang lainnya.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum,

¹¹ Sabaruddin sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pemerintahan-Adat Istiadat-Sastra-Bahasa*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau), h. 240.

maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksudkan disini adalah nash yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Keberadaan lembaga adat di desa kesugihan kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, ditaati dan dituruti masyarakat dilihat dari kemampuan mengatur dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan dan mengurus masalah sosial dalam masyarakat secara adat, untuk itu pemimpin dan perangkat adat harus memahami hal tersebut dan lebih memaksimalkan perannya yang dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa di desa kesugihan kecamatan kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Desa di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam hukum Islam terhadap peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kegunaan praktisnya yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹³
- b. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁴

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁵ Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala lembaga adat

¹² Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

¹³ *Ibid.*, h. 9.

¹⁴ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h.126.

¹⁵ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

dari pihak yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri.¹⁶ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁸ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepala lembaga adat dan anggota lembaga adat.

¹⁶ *Ibid* .,h. 58.

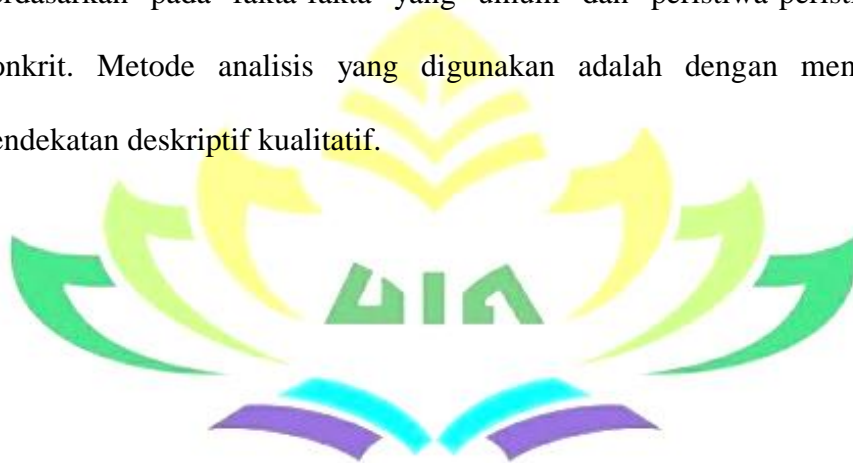
¹⁷ Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h.11 70.

¹⁸ Susiadi AS, *Op Cit*, h. 107.

- c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁹

4. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.



¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 198.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan suatu wadah atau organisasi yang mana memiliki peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar terbandungnya aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²⁰

Dalam tatanan suatu pemerintahan, desa merupakan suatu tempat dimana membentuk kelompok agar tercapainya sebuah visi dan misi bersama, dalam sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga yang mana setiap memiliki peranan dan fungsinya itu sendiri dalam memajukan pembangunan desa, adanya lembaga adat di desa sangat membantu aparat desa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam

²⁰ Firman sujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), h. 309.

desa, karena pemerintah telah menyerahkan urusan desa kepada aparat desa untuk menjadikan desa sesuai visi misi yang ada.

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang berbentuk atas dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.²¹

Pada umumnya yang membedakan desa dengan desa adat hanyalah pelaksanaan peraturan yang menyangkut pelestarian masyarakat adat, kedamaian kesejahteraan dan peraturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan tatanan aslinya. Pada saat ini desa dengan desa adat memiliki perlakuan yang sama dari pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam rangka memajukan desa, melakukan perubahan desa dan menyelenggarakan peraturan pemerintahan desa yang efektif dalam melaksanakan pembangunan desa serta memberikan pembinaan terhadap masyarakat setempat.

Adanya hukum adat yang berlaku di suatu desa dapat membantu aparat desa dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di desa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang

²¹ *Ibid.*, h. 300.

berlaku, adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang disuatu desa diman didalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatananhukum adat tersebut, dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan istilah “masyarakat adat”.²² Masyarakat merupakan suatu kumpulan sosial dimana adanya interaksi sosial yang terjadi di setiap saatnya, pengertian dari hukum adat lebih sering diindentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah.²³

Dalam perjalanannya hukum adat yang bersifat universal memiliki asas hukum adat tersendiri yang memiliki nilai nilai diantaranya:

1. Asas gotong royong yang telah tertanam dijiwa masyarakat.

Adanya asas gotong royong dalam masyarakat yang telah tertanam dalam masyarakat yang menyebabkan adanya jiwa sosial tinggi dan adanya kehidupan di masyarakat, yang dalam perkembangannya memiliki dampak perubahan dari intern maupun ekstern.

2. Asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat.

Asas hukum adat yang kedua yang memiliki nilai universal adalah asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas ini tercermin sekali dalam

²² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1.

²³ *Ibid.*, h. 2.

kehidupan tradisional masyarakat adat asas ini memiliki 2 unsur yaitu: asas fungsi sosial dan asas milik dalam masyarakat.

3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum

Asas ini pada hakikatnya merupakan alah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang senantiasa tercermin implementasinya dalam tata kehidupan masyarakat tradisional.

4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

Asas ini juga merupakan unsur demokrasi yang kedua setelah dari asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini merupakan ciri-ciri khas demokrasi asli yang telah ada dan dibina dalam kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala.²⁴

Lembaga adat suatu wadah atau organisasi yang mana ketika dalam penyelesaian suatu sengketa atau konflik adanya musyawarah antara para aparatur adat yang bisa disebut dengan musyawarah adat. Dimana musyawarah adat dilakukan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan bersama menurut tata tertib hukum adat.²⁵ Dalam lembaga adat adanya lembaga musyawarah adat di bagi antara lain:

²⁴ R. Soerojo Wigjojodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 61-79.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), h. 94.

1. Lembaga Musyawarah Kekerabatan

Lembaga ini adalah lembaga musyawarah yang berlaku dalam penyeleggaran pemerintahan persekutuan hukum adat kekerabatan.

Lembaga musyawarah kekerabatan di bagi menjadi tiga diantaranya: (1).

Musyawarah Keluarga (2). Musyawarah Kerabat (3). Musyawarah Suku.

2. Lembaga Musyawarah Ketetanggaan.

Lembaga ini ialah hanya terbatas pada bentuk musyawarah tetangga, musyawarah kampung dan musyawarah desa, yang sejak zaman

kekuasaan Kolonial diatur di dalam perundang-undangan ialah lembaga

musyawarah desa, sedangkan yang lainnya hanya berlaku berdasarkan hukum adat setempat. Lembaga musyawarah ketetanggaan di bagi

menjadi tiga diantaranya: (1). Musyawarah Tetangga (2). Musyawarah Kampung (3). Musyawarah Desa

3. Lembaga Musyawarah Keorganisasian

Lembaga musyawarah keorganisasian yang dimaksud adalah lembaga

adat yang merupakan sikap tindak perilaku orang yang suka berbicara, berunding, berembuk dan membahas persoalan bersama dalam wadah

organisasi. Lembaga musyawarah keorganisasian dibagi menjadi tiga

dianaranya: (1). Musyawarah Kumpulan (2). Musyawarah Organisasi (3).

Musyawarah Golongan.²⁶

²⁶ *Ibid.*, h. 193-128.

2. Dasar Hukum Lembaga Adat

Dalam suatu pemerintahan desa atau daerah adanya lembaga penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan suatu struktur yang telah diatur dalam Undang–Undang termasuk tentang lembaga adat desa, yang mana lembaga adat desa memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan desa agar tercapainya visi misi dan berkembangnya suatu desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 95 UU Desa No 6 Tahun 2014, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan suatu lembaga yang tetap menyelestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi tatanan asli desa.

Selain adanya peraturan yang mengatur tentang lembaga adat, ada juga peraturan yang mengatur tentang desa adat yang diatur dalam permendagri No. 111 Tahun 2014 yang mengatur mengenai peraturan desa adat. Peraturan desa adat diatur dalam ketentuan lain-lain pada pasal 30 ayat (1) dimana disebutkan bahwa peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di desa adat

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemeliharaan Budaya Lampung, Lembaga adat Lampung yaitu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejahteraan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lampung.

3. Peran Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa

Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, dan adapun tugas lembaga adat dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 yaitu:

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perseleisihan yang menyangkut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
2. Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

²⁷ Firman Sujadi, dkk, *Op Cit.* h, 347.

3. Menciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.
4. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Dalam tatanan pemerintahan desa, lembaga adat ikut dalam peranan menjalankan pemerintahan desa, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 Pasal 3 diatas dimana antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki peran masing-masing di desa tersebut untuk menjalankan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan desa tersebut.

Dimana lembaga adat ikut serta dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam memelihara adat istiadat setempat, demi terpeliharanya kebhinekaan.

Dalam menjalankan peranannya pemerintahan desa dalam menjalankan tugas perlu adanya kerjasama dengan lembaga adat,

dimana pemerintahan desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dalam kemasyarakatan adanya campur tangan dengan lembaga adat.

Dalam suatu lembaga adat seorang kepala adat memiliki peranan penting didalamnya, sebagaimana suatu program adat akan berjalan apabila seorang kepala adat aktif dalam menjalankan fungsi dari lembaga adat itu sendiri dan adapun kewenangan kepala adat tradisional itu sendiri antara lain:

1. Turut campur dalam transaksi-transaksi jual tanah.
2. Mengambil tanah wilayah desa selama waktu tertentu guna kepentingan desa.
3. Untuk menunjuk tanah yang kembali dikuasai oleh hak pertuanan kepada warga desa lainnya sebagai warga desa yang baru.
4. Turut campur dalam perbuatan-perbuatan hukum yang terpenting, seperti memungut anak, memelihara anak yang belum dewasa (perwalian), pertunangan/perkawinan/perceraian dan pembagian harga.²⁸

Kewenangan kepala adat di atas dalam adat tradisional memiliki arti tertentu, yaitu tidak hanya untuk menjadikan perbuatan yang bersangkutan itu perbuatan yang terang saja, melainkan yang

²⁸ R. Soerojo Wignojodipoero, *Op. Cit*, h. 43-44.

berhubungan rapat juga, dengan kesejahteraan rohani masyarakat desa.²⁹

Adapun fungsi kepala adat sebagai pimpinan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah:

1. Pembinaan dan memelihara kerukunan warga

Dalam sebuah desa adanya lembaga adat tentu adanya tokoh adat yang memiliki fungsi dan tugasnya seperti membina dan memelihara kerukunan warga, agar tidak terjadinya perselisihan sesama warga, dan menjadikan desa tersebut aman dan sejahtera.

2. Kemampuan kepala adat dalam menggerakkan partisipasi

Fungsi dan tugas dari kepala adat selanjutnya yaitu seorang kepala adat dituntut untuk dapat menggerakkan partisipasi antar warganya, baik dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada warganya agar dapat mencapai tujuan sesuai sesuai dengan perencanaan.

3. Tanggung jawab informal kepala adat dalam menggerakkan pembangunan

Seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap para warganya dimana dalam suatu wilayah, baik atau tidaknya suatu system pemerintahan yang diampu oleh

²⁹ *Ibid*, h. 44.

pemimpin itu sendiri tergantung bagaimana rasa tanggung jawab dari seorang pemimpinnya, karena seorang pemimpin memiliki tugas dan kewajiban terhadap warganya yang harus di pertanggung jawabkan dalam menjalankan tugasnya.

4. Melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat

Fungsi dari kepala adat selanjutnya yaitu melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dimana kepala adat mengajak dan bekerjasama kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.³⁰

Dalam PERDA provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Lembaga Adat memiliki tugasnya diantara lain:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat kepada pemerintah.
- b. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat istiadat.
- c. Melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan kebudayaan lampung pada umumnya dan khususnya hal-hal yang berkenaan dengan adat istiadat Lampung.

³⁰ Laksanto Utomo, *Op. Cit, Hukum Adat*, h. 155-156.

- d. Memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat, pemangku adat, petua-petua adat, pemuka adat lainnya dengan aparaturnya.

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa dibentuk berdasarkan dari berbagai kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, para ahli mendefinisikan tentang desa berbeda-beda.

Pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup sebagaimana yang dikemukakan oleh Bouman yang mendefinisikan desa, desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan lain sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah social.³¹

Menurut Unang sunardjo, pengertian tentang desa sebagai berikut:

³¹ Zuhraeni, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung, Harakindo publishing, 2014), h. 66.

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.³²

Pemerintahan desa adalah satu aspek sosio politik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan di tanah air kita.³³ Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintahan republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.³⁴

Menurut Kleintjes desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyelenggaraanya desa tidaklah bebas sepenuhnya, desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh gubernur jendral, kepala wilayah nya atau pemerintah dari

³² *Ibid.*, h. 67-68.

³³ M.Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan di Daerah*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h. 313.

³⁴ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 24.

kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan ordonansi.³⁵

Berdasarkan pada aturan hukum yang ada kewenangan desa dapat dikelompokkan menjadi empat tipe diantaranya:

1. Kewenangan originair (aseli), yang sering disebut hak atau kewenangan asal usul yang melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (*self Governing Community*).
2. Kewenangan devolutif, yaitu kewenangan yang melekat kepada desa karena posisinya ditegaskan sebagai pemerintahan local (*local Self Governing*).
3. Kewenangan distributive, yaitu kewenangan desa dalam bidang pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kepala desa.
4. Kewenangan negatif, yaitu kewenangan desa menolak tugas pembantuan dari pemerintah jika tidak disertai pendukungnya atau jika tugas itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.³⁶

Kewenangan originair atau kewenangan yang melekat pada desa harus selaras dengan peneyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asal usul adat istiadat setempat. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 butir 6 PP No.72 tahun 2005 tentang desa, dikatakan bahwa pemerintah desa

³⁵ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 79.

³⁶ Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit,Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, h. 133-134.

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan NKRI.³⁷

Pemerintahan desa memiliki tujuan untuk mencapai tujuan desa itu sendiri, dan tujuan tersebut diantaranya:

1. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang di kontruksikan dalam peraturan pemerintahan yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945 dan perundangan yang mengatur desa.
3. Dari segi oprasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Dari segi administrasi pemerintah yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan tata pemerintahan agar dapat

³⁷ Taliziduhu Ndraha, *Op. Cit*, h. 134.

terselenggara secara efektif, efisien dan produktif dengan menerapkan prinsip-prinsip rule of law dan demokrasi.³⁸ Dalam suatu pemerintahan desa adanya pengaturan desa yang menunjang program-program pemerintahan desa demi terwujudnya visi misi desa dalam mensejahterakan masyarakat. Dimana tujuan pengaturan desa yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan republic Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna mensejahterakan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

³⁸ Khairuddin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, Seksi penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2004), h. 20.

6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.³⁹

2. Dasar Hukum Pemerintahan Desa

Setelah adanya penyerahan pembagian tugas dari pemerintah terhadap pemerintah daerah muncullah adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa diantaranya:

1. Pemerintahan Desa dalam UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan desa.
2. Pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.
3. Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979.
4. Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

³⁹ Laksanto Utomo, *Op. Cit.*, h. 201-202.

⁴⁰ Zuhraeni, *Op Cit.*, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, h. 93-99.

5. Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.⁴⁰

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas memiliki definisi tersendiri terhadap dasar hukum tentang pemerintahan desa.

3. Hubungan Pemerintahan Desa dengan Lembaga Adat

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁴¹

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 1999, asas umum penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia meliputi:

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hokum yang me nutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
3. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

⁴⁰ Zuhraini, *Op Cit.*, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, h. 93-99.

⁴¹ HAW.Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Aseli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 4.

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

4. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
5. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Penggunaan asas-asas yang berlaku didalam sistem pemerintahan Indonesia harus diseimbangkan pemakaiannya, asas desentralisasi dijalankan bersama-sama dengan dekonstruksi serta tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.⁴³

Dalam menjalankan tugas pemerintahan desa tidak hanya menjalankan tugasnya sendiri, tetapi dibantu dengan aparatur lainnya

⁴² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 33-34.

⁴³ Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 144.

salah satunya adalah lembaga adat, disinilah adanya kaitan antara pemerintahan desa dengan lembaga adat, sebagaimana yang tetuang dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dalam wilayah Negara Republik Indonesia pada BAB IX pasal 14 no 1 bahwasannya: hubungan lembaga adat dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.⁴⁴

Antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki keterikatan karena untuk mencapai tujuan dari desa perlu adanya kerjasama diantara keduanya, keterkaitan antara pemerintahan desa dengan lembaga adat dalam menjalankan system pemerintahan desa adakalanya berbagai tugas, dimana pemerintahan desa fokus terhadap pembangunan anggaran desa dan lain sebagainya, sedangkan lembaga adat lebih terfokus kepada pemeliharaan adat istiadat, masyarakat adat dan persoalan-persoalan adat.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

⁴⁴ Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia, *Tentang Hubungan dan Tata Kerja Lembaga Adat*, Labridrajanusantara.blogspot.com, diakses pada tanggal 18 Desember 2018.

Istilah mengenai hukum Islam sering kita artikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang digunakan oleh mayoritas umat Islam atau dalam negara Islam.

Hukum Islam adalah gabungan dari dua suku kata yaitu hukum dan Islam, kata hukum merupakan suatu istilah dimana hukum merupakan suatu aturan atau norma-norma yang dibuat oleh pemerintah untuk ditaati oleh masyarakat dengan tujuan agar keadaan suatu negara tersebut dapat terkondisikan dengan adanya hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Sedangkan Islam merupakan suku kata yang berasal dari bahasa Arab *سَلَامٌ - يُسَلِّمُ* yang berarti keselamatan, dimana Islam hadir dalam masyarakat untuk menjadi pedoman bagi umatnya dalam bermasyarakat. Hukum Islam merupakan sekumpulan ketetapan hukum kemashlahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun yang tidak langsung (implisit).⁴⁵

Hukum Islam merupakan syariat-syariat atau aturan yang berasal dari Allah SWT untuk mengatur tatanan kehidupan umatnya, yang mana aturan tersebut berasal dari Al-Quran dan Hadist baik berupa perintah, anjuran dan larangannya sebagai pedoman utama bagi para umatnya.

Adanya prinsip-prinsip dalam hukum Islam merupakan salah satu pembuktian bahwa Islam memiliki prinsip untuk membangun umatnya

⁴⁵ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2016) h. 11

menuju jalan yang selalu diridhoi Allah SWT agar dalam menjalani kehidupan memiliki pedoman yang menjadi dasar umat Islam, tiap-tiap pakar hukum Islam berbeda-beda dalam menyebutkan jumlah prinsip-prinsip hukum Islam meskipun secara kuantitatif setidaknya ada Sembilan prinsip dalam Islam diantaranya:⁴⁶

1. Prinsip Tauhid

Prinsip ini bila dikaitkan dengan pelaksanaan hukum Islam ia merupakan ibadah, prinsip tauhid ini pun menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya, prinsip ini pun prinsip berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara atau prinsip berkomunikasi langsung.

2. Prinsip Al-Adl (keadilan)

Dalam prinsip ini keadilan dalam konteks al-Quran tidak lepas dari moralitas realisasi keadilan, pertama-tama berpedoman pada wahyu ilahi, Allah sebagai yang maha adil, memerintahkan manusia bersikap adil baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Keadilan adalah sendi pergaulan sosial yang paling fundamental, jika keadilan dilanggar, maka sendi-sendi masyarakat akan goyah.

⁴⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 211-212.

3. Prinsip al-Musawwah (persamaan)

Prinsip persamaan akan terwujud jika terjalin hubungan persaudaraan semakain banyak persamaan, semakin kokoh pula persaudaraan, prinsip ini bah wa semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua.

4. Prinsip Al-Hurriyah (kemerdekaan)

Prinsip al-hurriyah yang dimaksud adalah kebebasan umat Islam meliputi kebebasan individu, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan kebebasan berinisiatif.

5. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Prinsip amar makruf nahi munkar, amar makruf berarti hukum Islam digerakan untuk merekam umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Allah, nahi munkar berfungsi sebagai sosial kontrol.

6. Prinsip Al-Ta'awun (Tolong menolong)

Prinsip ini dalam hukum Islam bisa diterapkan dalam bentuk bahu membahu merumuskan dan menggali hokum Islam baik secara antar individu atau antar lembaga atau bernegara.

7. Prinsip Tasamuh (Toleransi)⁴⁷

Suatu prinsip yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama dan berkepercayaan, menjamin kebebasan beribadah menurut agama dan

⁴⁷ *Ibid*, h. 212

kepercayaan masing-masing, oleh karena itu prinsip ini menekankan umatnya untuk hidup rukun tanpa memandang ras, suku, agama dan budaya.

8. Prinsip Al-Tha'ah (Ketaatan pada Ulil Amri)

Prinsip ini dimana ulil amri memegang kekuasaan yang sah atas negara menurut syara' yang wajib ditaati masyarakatnya, akan tetapi pemerintah mengeluarkan undang-undang atau perintah yang bertuju kemaksiatan, tidak ada kewajiban, patuh dan taat sedikitpun kepadanya.

9. Prinsip Asy-Syura (Musyawarah)⁴⁸

Prinsip musyawarah teramat penting harus berada dalam kehidupan masyarakat, karena dalam menyelesaikan berbagai persoalan perlu adanya musyawarah antar sesama sehingga persoalan-persoalan yang ada dapat terselesaikan.

Selain dari pada prinsip-prinsip dari hukum Islam yang ada, hukum Islam pun memiliki tujuan untuk melaksanakan perintahan kehendak dari Allah SWT dan menjauhi larangannya, adapun tujuan dari hukum Islam yang telah dirumuskan oleh ahli hukum Islam terkemuka Abu Ishaq Al-Satibi merumuskan lima tujuan hukum Islam diantaranya:

- 1) Memelihara Agama.
- 2) Memelihara Jiwa.
- 3) Memelihara Akal.

⁴⁸ *Ibid*, h. 213

- 4) Memelihara Keturunan.
- 5) Memelihara Harta benda.⁴⁹

2. Dasar Hukum Islam

Dari penjelasan mengenai Hukum Islam yang ada pada hakekatnya telah mengetahui dan memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber Hukum Islam itu sendiri, sumber hukum Islam disini ialah Al-Quran dan hadist, dimana sumber hukum ini menjadi acuan dalam menetapkan suatu hukum Islam sesuai ketentuan yang ada.

1. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam, dimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman bagi umat manusia. Secara bahasa al-Quran berasal dari Bahasa arab يقرأ - يقرأ yang berarti bacaan.

Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بِهِ الْبَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 213.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.”(QS. An-nisa (4): 105).⁵⁰

Sayyid Husein Nasr Berkata: “sebagai pedoman abadi, Al-Quran mempunyai tiga petunjuk bagi manusia:

Pertama, Al-Quran adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda di jagad raya, AL-Quran berisi segala petunjuk tentang iman atau keyakinan, syari’at atau hukum akhlak atau moral yang perlu dipedomani oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, al-Quran berisi petunjuk tentang kehidupan manusia, yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian, yang berasal dari-Nya dan pasti kembali kepada-Nya. *Ketiga*, Al-Quran berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam Bahasa biasa. Ayat-ayat Al-Quran karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari yang kita pelajari secara rasional, yang mana ayat tersebut

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pelita III, 1982/1983), h. 139.

mempunyai kekuatan untuk melindungi manusia, itulah mengapa kehadiran fisik al-Quran membawa berkat tersendiri terhadap manusia.⁵¹

Al-Quran diturunkan Allah kepada nabi Muhammad saw sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia, sebagai kemashlahatan untuk para umatnya, yang dapat mendatangkan manfaat dan keberuntungan bagi umatnya. Adapun fungsi dari Al-Quran yang terdapat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya adalah:

1. Sebagai *hudan*, atau petunjuk bagi kehidupan umat.
2. Sebagai *rohmat*, atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya.
3. Sebagai *furqon*, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk yang halal dan haram, yang indah dan jelek.
4. Sebagai *mau'izzah* atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai *busyra'*, yaitu berita gembira bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
6. Sebagai *tibyan*, yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah.

⁵¹ *Ibid*, h. 74-75.

7. Sebagai *mushaddiq*, atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya, seperti: taurat, zabur dan injil
8. Sebagai *nur*, atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan kemashlahatan.⁵²

Al-Quran yang merupakan sumber utama dari Hukum Islam yang berisi tentang:

- a. Ajaran tentang kepercayaan (aqidah), yaitu ketauhidan, kebatilan paham syirik, kemunafikan, kekafiran, dan sebagainya.
- b. Sejarah tentang umat sebelum nabi saw
- c. Informasi tentang hal-hal yang akan terjadi pda masa yang akan datang, seperti hari kiamat, surga dan neraka.
- d. Didalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan.
- e. Terdapat hukum atau peraturan yang menyangkut ibadah dan muamalah.⁵³

Al-Quran sebagai landasan hukum umat manusia, yang didalamnya memiliki garis-garis besar diantaranya:

- a) Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat Nya, kitab-kitab Nya, para Rasul Nya, hari kemudian, dan qadla dan qadar yang baik dan buruk

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 53-55.

⁵³ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.

- b) Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
- c) Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
- d) Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti nabi-nabi dan rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumnya, maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlak.⁵⁴

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu dan jika kamu pertengkarkan sesuatu kembalilah hal itu kepada Allah dan Rosul-Nya, sekiranya kamu benar-benar mengimankan Allah dan akhir kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa (4): 59).⁵⁵

⁵⁴ Moh Riva’i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Alma’ Arif, 1995), h. 97.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 128.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya perintah mentaati Allah dan Rasulnya termasuk perintah mengikuti al-Quran dan as-Sunnah sebagaimana al-Quran dan as-Sunnah adalah sumber hukum dan pedoman umat Islam. Menurut pandangan Islam hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Quran adalah:

- 1) Hukum-hukum *I'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dngan kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, dan Qada dan qadar.
- 2) Hukum- hukum *akhlak*, yaitu hukum-hukum allah yang berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasai dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat yang tercela.
- 3) Hukum-hukum *amaliyah*, yakni hukum-huum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dan hubungan kerja sama antar sesama manusia.⁵⁶

2. Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadist, dimana secara bahasa hadist berasal dari Bahasa arab yaitu حدث - يحدث yang berarti *berita atau*

⁵⁶ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit*, h. 84.

kabar, dan secara istilah hadist merupakan suatu perkataan, perbuatan dan ketetapan nabi.

Dalam posisi sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, as-sunnah lebih banyak berfungsi sebagai bayan, atau penjelas terhadap berbagai ketentuan yang telah diuraikan dalam al-Quran, mempertegas ketentuan-ketentuan tersebut dan kadang menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh al-Quran.⁵⁷

As-sunnah atau hadist memiliki beberapa fungsi sebagai sumber hukum kedua diantaranya:

- 1) Fungsi bayan, yang merupakan fungsi utama dari as-sunnah, karena banyak ayat-ayat hukum yang dinyatakan Tuhan dalam ungkapan yang mujmal, umum dan mutlaq, sehingga sukar ditangkap pemahaman oprasionalnya.
- 2) Fungsi dari as-sunnah ialah memperkuat dan mempertegas berbagai ketentuan hukum yang telah dikemukakan oleh al-Quran.
- 3) Fungsi ke tiga dari as-sunah ialah menetapkan hukum bagi persoalan-persoalan yang belum terjangkau oleh al-Quran.⁵⁸

⁵⁷Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 37.

⁵⁸*Ibid.*, h. 37-39.

Pentingnya kedudukan Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam ke dua agar bisa ikut menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum ada di dalam al-Quran. Dan menjadi penjelas atau tafsiran yang otentik mengenai ayat al-Quran atau sebagai kaidah hukum-hukum baru yang perlu dikembangkan atau perlu dirumuskan lebih lanjut oleh akal pikiran manusia.⁵⁹

3. Metode Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada berbagai metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis salah satunya dengan metode:

1. Ijtihad

Menurut Bahasa, pengertian dari ijtihad ialah peneraan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Dan menurut dari praktek para sahabat, pengertian ijtihad ialah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitab Allah SWT dan Sunnah Rasul s.a.w baik melalui sesuatu yang nash, maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syariat.⁶⁰

Tuntutan untuk berijtihad di nyatakan dalam hadis nabi s.a.w

⁵⁹ Mohammad Daud Ali , *Op. Cit*, h. 95.

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali dkk, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992) h. 23.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَنَحَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ. مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.⁶¹

“Dari Amar bin al-Ash, dia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda, kalau seorang hakim menetapkan suatu hukum lewat ijtihadnya dan benar dalam ijtihadnya itu, maka ia akan memperoleh dua kali lipat pahala, sementara kalau salah, dia hanya memperoleh satu pahala”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Jika dilihat dari segi metodenya sebagaimana yang dirumuskan ad-duwailibi, ijtihad dapat dibagi kepada tiga macam yaitu:

1. *Al-ijtihad al-bayani*, yaitu ijtihad yang berkaitan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam nash al-Quran dan Sunnah.
2. *Al-ijtihad al-qiyasi*, yaitu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash al-Quran maupun hadisnya.
3. *Al-ijtihad al-istsislahi*, yaitu suatu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang

⁶¹ Al-Imam Abiy Zakariya Yahya Ibnu Syarif Al-Nawawiy Al-Damasyqiy, Syeikh Shahih Muslim, di kutip 1oleh Imad Zakiy Al-Barudiy, Juz. XII (Mesir: Al-Maktabah Al-Thufiqiyyah, 2008), h. 11.

tidak ada nashnya baik dalam al-Quran maupun Sunnah dengan cara penalaran berdasarkan prinsip al-Istislah (kemashlahatan).⁶²

Peran lain dalam ijtiḥad dalam hukum Islam adalah dalam rangka memberikan jawaban-jawaban hukum untuk berbagai persoalan temporer yang dihadapi para mujtahid, yang dapat ditempuh melalui dua corak ijtiḥad, yaitu ijtiḥad lafdzi dan ijtiḥad aqli.⁶³

Menurut rumusan *ushuliyyîn*, ijtiḥad adalah pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat *dhann* terhadap sesuatu hukum syara' (hukum Islam).

1. Pelaku ujtiḥad adalah seorang ahli fikih/ hukum Islam (fakih), bukan yang lain;
2. Yang ingin dicapai oleh ijtiḥad adalah hukum syar'i, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan hukum i'tiqadi atau hukum khuluqi;
3. Status hukum syar'i yang dihasilkan oleh ijtiḥad adalah *dhanni*.⁶⁴

Menurut beberapa pendapat ahli *ushul fiqh* mengenai pembagian ijtiḥad menurut Mahdi Fadhl membagi ijtiḥad menjadi dua bagian diantaranya:

⁶² Abdul Rahman, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 348.

⁶³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *Op Cit.*, h. 115.

⁶⁴ Hasani Ahmad Syamsuri, dalam jurnal *Al-'adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011., h. 223-224.

1. Ijtihad mutlak

Ijtihad mutlak yaitu ijtihad yang melengkapi semua masalah hukum, tidak memilah-milihnya dalam bentuk bagian-bagian masalah hukum tertentu. Ulama yang mempunyai kemampuan dalam hal ini disebut *mujtahid mutlaq*, yaitu seseorang faqih yang mempunyai kemampuan ijtihad meng-istanbathkan seluruh bidang hukum dari dalil-dalilnya, atau mempunyai kemampuan mengistinbathkan hukum dari sumber-sumber hukum yang diakui secara syar'i dan aqli.

2. Ijtihad Juz-iy

Ijtihad juz-iy dimana ijtihad ini adalah kajian mendalam tentang kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalam bagian yang lain. Imam mujtahid yang empat (Maliki, Syafi'I, Hambali, dan Ahmad) termasuk kepada bagian pertama (mujtahid mutlaq) dan kebanyakan mujtahid lainnya termasuk bagian yang kedua (mujtahid juz-iy).⁶⁵

Dalam berijtihad harus terlebih dahulu memenuhi syarat:

1. Mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu, meskipun tidak hafal diluar kepala.

⁶⁵ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-I*, (Lampung: Seksi Penerbitan fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 74-75.

2. Mesti mengetahui Bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu, seperti nahwu, sharaf, ma'ani, bayan, badi, agar dengan ini dapat mentafsirkan ayat-ayat al-Quran atau Sunnah dengan cara berfikir yang benar.
3. Mesti mengetahui ilmu ushul fiqh dan qaidah-qaidah fiqh yang seluas-luasnya, karena ilmu ini sebagai dasar berijtihad.
4. Mesti mengetahui soal-soal ijma', hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma' itu.
5. Mengetahui nasikh Mansukh dari al-Quran dan Sunnah.
6. Mengetahui ilmu riwayat dan dapat membedakan: mana hadits yang shahih dan hasan, mana yang dala'if, mana yang maqbul dan yang mardud.
7. Mengetahui rahasia-rahasia tasyri' (Asrarusy Syari'ah) yaitu qaidah-qaidah yang menerangkan tujuan syara' dalam meletakkan beban taklif kepada mukallaf.⁶⁶

Dalam Islam ada istilah dengan *ahlul hilli wal aqdi* (Dewan Perwakilan Rakyat, dimana *ahlul hilli wal aqdi* merupakan lembaga perwakilan rakyat pada masa Islam tersebut, dimana para khalifah

⁶⁶ Moh Riva'I, *Op. Cit.*, h. 125.

merujuk kepada *ahlul hilli wal aqdi* dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen dengan pendapat mereka.⁶⁷

Dimana *ahlul hilli wal aqdi* dalam tugasnya tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemashlahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar dari dasar-dasar syariat yang baku, tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan tugas dan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.⁶⁸

Kebersamaan para ulama dan umat muslim dalam *ahlul hilli wal aqdi* disusun dengan pola kelembagaan seperti tubuh yang satu (*jasadul wahid*) yang terdiri dari dua bagian utama yang sangat berkaitan erat yakni kepala dan badan, sehingga bagian lainnya merupakan anggota badan yang tugasnya melaksanakan instruksi dari kepala dalam liputan pngelolaan keperluan badan, oleh karena itu

⁶⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 79.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 80.

bagian utama dalam *ahlul halli wal aqdi* yang telah ditetapkan adalah majelis utama dan dewan-dewan.⁶⁹

Dalam bagian dari *ahlul halli wal aqdi* adalah majelis utama dan dewan-dewan yang mana didalam dewan dewan tersebut adanya ketentuan-ketentuan tentang dua puluh dewan yang didalamnya salah satunya terdapat dewan ideologi dan adat, yang mana tidak hanya mengurus kepentingan kenegaraan, dalam istilah *ahlul halli wal aqdi* dapat dikatakan memiliki tugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sama halnya dengan hukum adat, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, dimana dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum tersebut perlu adanya ijtihad dari para aparatur adat. Berijtihad dalam bidang-bidang yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-sunah, dapat ditempuh dengan berbagai cara, diantaranya: *Qiyas, maslahat mursalah, istishan, istishab, dan urf*.

Dalam pembahasan skripsi yang penulis paparkan mengenai adat, dimana adat merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam fiqh bisa disebut dengan *maslahahat mursalah*, dimana *maslahahat mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan

⁶⁹ <http://al-ulama.net/kelembagaan-ahlul-halli-wal-aqdi/.htm> (20 Januari 2019).

hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan mudarat.⁷⁰

Dari pengertian *masalahahat mursalah*, bahwasannya lembaga adat dapat melakukan penyelesaian berbagai persoalan-persoalan yang ada didalam masyarakat selain menggunakan metode ijtihad dapat juga melakukan dengan metode masalahah mursalat, yang mana ini dilakukan untuk kepentingan bersama.

Dalam hukum Islam istilah adat istiadat bisa disebut dengan urf, dimana adat istiadat ini harus tetap berjalan selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan As-sunah. Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta yang sangat memperhatikan segala aspek termasuk adat istiadat yang merupakan salah satu faktor sosial yang memiliki kekuatan hukum dan memiliki sanksi.

Yang mana adat sudah ada sejak awal Islam datang, dimana pembahasan adat ini terus berkelanjutan dengan memepertimbangkan apakah adat ini dapat dijadikan salah satu penetapan sumber hukum Islam atau tidak. Dalam pandangan sarjana-sarjana hukum positif sendiri sampai sekarang urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari

⁷⁰*Ibid*, h. 49.

hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.⁷¹

Atas dasar-dasar tersebut para ahli hukum Islam dalam kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum, yaitu adat dapat menjadi sumber penetapan hukum (*al-adat muhakkamat*), para fuqaha berikutnya kemudian mengkualifikasi peran adat dengan berbagai persyaratan agar valid menjadi bagian dari hukum Islam seperti yang dinyatakan oleh Tahrir Mahmood adalah:

1. Adat secara umum dipraktikan oleh anggota masyarakat jika dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat, atau dipraktikan sebagian kelompok masyarakat tertentu.
2. Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu akan dijadikan sebagai hukum.
3. Adat harus dipandang tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari al-Quran dan Hadist.
4. Dalam hal perselisihan, adat hanya akan dipakai ketika tidak ada penolakan yang eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.⁷²

⁷¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 90.

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 53.

Dalam masyarakat yang bersifat dinamis, selalu terjadi berbagai perubahan, termasuk berkembangnya penggunaan ungkapan-ungkapan tertentu secara menyimpang dari pengertian aselinya, penerapan hukum ditengah-tengah masyarakat, keberadaan urf atau adat perlu diperhatikan, perilaku dan pernyataan-pernyataan hukum seseorang haruslah dianggap terikat dengan kebiasaan-kebiasaan semasa dan setempat.⁷³

Bagi para mujtahid yang menjadikan *Urf* sebagai sumber hukum dalam Islam diperlukan syarat-syarat diantaranya:

1. Urf tersebut tidak bertentangan dalil *qath'iy*; urf yang bertentangan dengan dalil *qath'iy* tidak dapat dipakai sebagai dalil hokum karena kehujjahan urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.
2. Urf tersebut berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat tersebut, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.
3. Urf harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian.⁷⁴

⁷³ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 155.

⁷⁴ Muhammad Rusfi, *Op. Cit.*, h. 173.

Dalam al-Quran terdapat ayat tentang adat, dimana dalam Islam adat diperbolehkan asal tidak keluar dari syariat agama dan tidak menyekutukan Allah SWT.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh. (QS: Al-A'raf (7): 199).⁷⁵

Dalam ayat diatas jelas diterangkan bahwa menyeru untuk berbuat yang ma'ruf, dimana berbuat baik terhadap sesama, dalam adat istiadat pun untuk mengerjakan yang baik, yang sudah tertanam dalam diri masyarakat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat ini lah ayat yang menyeru untuk berbuat baik sehingga telah menjadi tradisi masyarakat.

Menurut Hasbi urf adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia, dan ia berpendapat dalam merumuskan fikih Indonesia, adat yang telah berkembang dalam masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan syara ditampung dalam rangka fikih yang diberlakukan di Indonesia.⁷⁶

Dalam kehujjahannya urf menurut para ulama diantaranya:

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 255.

⁷⁶ *Ibid*, h. 160.

1. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum Islam.
2. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Golongan Imam Syafi'i betul-betul menjauhinya untuk menggunakannya dalam istinbath hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil.⁷⁷

Dalam pandangan hukum Islam bahwa realitasnya sistem hukum Islam senantiasa menyadari keefektifitas adat dalam proses kreasi hukum Islam, penerimaan terhadap adat atas dasar kemashlahatan umum senantiasa dianggap sebagai suatu keharusan untuk mengoprasikan sistem hukum Islam yang selalu dituntut untuk mampu mempertemukan berbagai macam kepentingan dan memecahkan problem-ptoblem yang muncul dalam masyarakat yang jauh dari tempat kelahiran system hukum Islam.⁷⁸

Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, dan bukannya primer, dalam arti diaplikasikanya prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap permasalahan-

⁷⁷ *Ibid*, h. 178.

⁷⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h.26.

permasalahan yang muncul, namun ketika beberapa contoh yang terdapat dalam karya-karya para Juris muslim menunjukkan bahwa adat telah berperan sebagai sumber hukum yang sangat penting.⁷⁹



⁷⁹ *Ibid.*, h. 18.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kesugihan

Desa kesugihan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan kalianda lampung selatan, dalam sejarah tertulis kesugihan merupakan desa yang sangat subur, konon desa kesugihan merupakan desa banyak *buway* yang dalam istilah adat artinya banyak keturunan sehingga kependudukan di desa kesugihan sangat ramai, hingga sampai saat ini letak desa kesugihan disebelah barat desa pematang.

Di awal kemunculannya, Desa kesugihan merupakan desa yang masih dengan adanya para pendatang yang ingin menetap dan tinggal di desa kesugihan, desa kesugihan merupakan desa yang terkenal dikalangan penduduk, desa sekitar bahkan sampai keluar lampung selatan, karena desa kesugihan terdapat tokoh adat yaitu Bandar Marga Legun.

Sesuai dengan namanya kesugihan diartikan dengan banyak atau kaya, kaya dalam arti buway, Bahasa, wilayah, dan sumber daya alamnya, desa kesugihan juga berbatasan dengan Jambat Beduk Suka Marga dan ujung timur berbatasan dengan jondong Pesisir dan kawasan gunung Rajabasa. Setelah tahun 1949 desa kesugihan dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu desa Buah

Bekhak dan Desa Sumbur Kembang, dan pada tahun 1984 dimekarkan kembali menjadi desa Bulok.⁸⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, pemangku adat didesa kesugihan tetap dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam acara perkawinan, masalah kebudayaan, adat maupun ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa kesugihan merupakan salah satu desa dari 25 desa dan 4 kelurahan yang ada dikecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai luas 593 Ha, dengan batas-batas wilayah diantaranya:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa canggu, kedaton, dan way urang.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Sumur Kumbang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa buah bekhak dan Bumi Agung
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Pematang.

Desa kesugihan memiliki visi dan misi dalam pemerintahan desa dalam memajukan pembangunan desa, dimana visi dari desa kesugihan: mewujudkan Desa Kesugihan menjadi desa mandiri dalam bidang pertanian dan industri kecil. Dan misi Desa Kesugihan adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintahan desa, sesuai dengan Visi desa yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Mukhlisin, Kepala Desa, Desa Kesugihan, Pada tanggal 20 Desember 2018.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk

| NO | DUSUN | JUMLAH PENDUDUK |
|----|-----------|-----------------|
| 1 | Dusun I | 724 |
| 2 | Dusun II | 659 |
| 3 | Dusun III | 328 |

Tabel 2.
Jumlah Mayoritas Penduduk

| NO | DUSUN | SUKU | | | | JUMLAH |
|----|-----------|---------|--------|-------|------|--------|
| | | Lampung | Jaseng | Sunda | Jawa | |
| 1 | Dusun I | 520 | 70 | 60 | 74 | 724 |
| 2 | Dusun II | 550 | 50 | 25 | 34 | 659 |
| 3 | Dusun III | 208 | 60 | 25 | 35 | 328 |

Tabel 3.
Mata Pencaharian Penduduk

| NO | MATA PENCAHARIAN | JUMLAH |
|----|------------------|-----------|
| 1. | Petani | 395 orang |
| 2. | Pedagang | 6 orang |
| 3. | Swasta | 22 orang |
| 4. | PNS | 15 orang |
| 5. | Buruh/Tukang | 28 orang |

Desa kesugihan mayoritas bermata pencaharian petani, dimana kepala desa kesugihan merupakan ketua kelompok tani, yang sangat pesat memajukan pertanian di desa kesugihan, sehingga sektor pertanian di desa kesugihan berkembang pesat dari desa lainnya.

B. Program-program Lembaga Adat

Dalam terselenggaranya kegiatan keikutsertaan adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, program-program tersebut yang telah dimusyawarahkan oleh aparatur desa ialah:

1. Mengangkat dan mengharumkan kehidupan masyarakat.

Lembaga adat desa kesugihan memiliki program-program tersendiri untuk mewujudkan visi misi, dan membantu para aparatur pemerintahan desa, adanya program ini, lembaga adat ikut mengayomi, merangkul masyarakat agar tetap terjalinnya dan terjaganya kehormatan dan keharmonisan desa.

2. Melestarikan budaya dan adat istiadat.

Program ini sangat membantu aparatur desa dalam melestarikan adat istiadat yang sudah ada, seperti kesenian, budaya yang ada di masyarakat desa kesugihan, sehingga adat istiadat yang telah ada tidak akan punah ditengah zaman modern saat ini.

3. Menjaga dan menanamkan budi pekerti yang baik pada masyarakat.

Adanya program ini akan mendukung budi pekerti yang baik dalam suatu masyarakat, sehingga akan menumbuhkan generasi yang memiliki akhlak

yang baik, sehingga akan terjalinnya keamanan, kesejahteraan serta keharmonisan dalam masyarakat.

4. Menjaga kedamaian dan kesejahteraan yang ada dimasyarakat.⁸¹

Dalam menjalankan program yang ada diatas, aparat adat bekerjasama dengan aparat desa, tokoh masyarakat maupun dengan pemuda-pemudi yang ada di desa tersebut. Jika ditanya tentang kendala-kendala adat dalam menjalankan program-program dari lembaga adat itu sendiri, sampai sekarang belum adanya kendala-kendala dari pelaksanaan program tersebut karena hubungan kerjasama antara tokoh adat, para pemuda dan aparat desa saling membantu dalam melaksanakan program yang ada, sehingga kendala-kendala tersebut kecil kemungkinan untuk terjadi.

Adat istiadat yang ada di desa kesugihan merupakan sarana untuk mencetak generasi bangsa dalam berbudi pekerti yang baik, seyogyanya salah satu bentuk partisipasi lembaga adat kepada pemerintahan desa untuk membentuk akhlak masyarakat, dan memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap masyarakat sekitar, karena jika rasa kepedulian sudah tertanam dalam diri masyarakat, maka untuk menjalankan program-program pemerintahan desa pun akan mudah di lalui, pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya aparat pemerintahan yang melaksanakannya, tetapi

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Azhar Marzuki, Kepala Adat Desa Kesugihan, *Ibid*.

adanya kerjasama dengan masyarakat, karena semua program pemerintahan desa akan kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Menurut kepala desa, tokoh adat atau lembaga adat desa kesugihan, bisa di katakan BPD (Badan Pengawasan Desa), dimana kepala adat termasuk kedalam anggota BPD tersebut, dalam setiap permusyawaratan, perencanaan, Pengawasan maka lembaga adat ikut serta dalam melaksanakannya.

Lembaga adat tidak selalu ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena jika aparatur desa sudah diatur dalam Undang-Undang, sedangkan lembaga adat, sudah ada sejak zaman Belanda, di desa kesugihan sudah ada secara turun temurun karena adat di desa kesugihan adalah adat Sai Batin, dimana antara lembaga adat dan aparatur desa memiliki bidang masing-masing dalam menjalankan fungsinya dalam pemerintahan desa.

C. Hubungan Lembaga Adat Dengan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari wawancara penulis terhadap informan di lembaga adat desa kesugihan bahwa hubungan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan desa sebagai berikut:

1. Hubungan kemitraan

Hubungan lembaga adat desa kesugihan dengan pemerintahan desa merupakan hubungan kemitraan, dimana dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan adanya koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintahan desa membuat hubungan keduanya semakin terjalin, hubungan kemitraan merupakan hubungan kesetaraan antar lembaga adat dengan pemerintahan desa, dimana lembaga adat dengan lembaga-lembaga yang ada di desa kesugihan saling bahu membahu dalam kemajuan desa tersebut.

Walaupun lembaga adat memiliki kedudukan yang sangat kuat di desa tersebut, tetapi dalam suatu pemerintahan tetap pemerintah desa yang berwenang di desa, dengan itu adanya hubungan kemitraan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa, dimana keharmonisan antara keduanya harus tetap terjalin agar tetap antara lembaga adat dengan pemerintah desa berjalan dengan satu tujuan, demi kesejahteraan masyarakat.⁸²

Dari wawancara tersebut dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa lembaga adat tidak hanya berperan penting dalam sebuah desa tetapi lembaga adat ikut andil dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di desa kesugihan tersebut, dengan adanya koordinasi dari kepala desa ke

⁸² Wawancara dengan Bapak Azhar Marzuki, Kepala Adat Desa Kesugihan pada tanggal 05 Desember 2018.

kepala adat desa kesugihan, sehingga lembaga adat dapat menjalankan tugasnya di dalam desa tersebut.

2. Hubungan Koordinasi

Hubungan koordinasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalin sebuah hubungan, baik hubungan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa maupun dengan lembaga lainnya, agar tetap terjalin keharmonisan dan keterbukaan antar suatu lembaga dengan lembaga lainnya, baik secara resmi maupun tidak resmi, seperti halnya dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di desa, kepala desa selaku pemimpin utama yang ada di desa tidak lupa untuk berkoordinasi dengan kepala adat dimana dalam sebuah desa tersebut kepala adat memiliki kedudukan tertinggi atau dengan istilah sesepuh desa tersebut, dengan demikian kepala desa menghormati tetua adat di desa tersebut, seperti halnya dalam mengatasi konflik kesalah pahaman antara desa Sukaratu dengan Desa kesugihan, dimana kepala desa kesugihan datang ke kepala adat untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga terjadilah rapat atau musyawarah antara kedua desa tersebut hingga perdamaian antara kedua desa dapat terjalin kembali, dan inilah urgensi adanya aspek koordinasi antar lembaga-lembaga yang ada di desa.

3. Hubungan Kontrol Sosial

Hubungan kontrol sosial juga merupakan salah satu aspek penting yang harus terjalin di dalam desa, dimana sebagai lembaga penting di desa

lembaga adat juga ikut dalam pengawasan pembangunan desa demi terselenggaranya suatu pemerintahan desa, walaupun sebenarnya yang sangat berperan adalah lembaga BPD (Badan Pengawas Desa), namun di desa kesugihan lembaga adat ikut dalam melakukan pengawasan di desa kesugihan dimana lembaga adat memiliki wewenang yang sama terhadap lembaga BPD (Badan Pengawas Desa) dalam melakukan pengawasan desa agar terlaksannya pembangunan desa dan terlaksananya suatu penyelenggaraan pemerintahan demi mencapai tujuan desa tersebut.

D. Peran Lembaga Adat Desa Kesugihan

Lembaga adat di desa Kesugihan merupakan salah satu desa yang masih memegang teguh adat istiadat, adat istiadat di Lampung terbagi dua yaitu adat *pepadun* dan adat *sai batin*, desa kesugihan merupakan desa adat *sai batin*, yang sistem kekerajaannya berdasarkan *tracht* (keturunan), dalam berbagai aspek adat *pepadun* dan adat *sai batin* memiliki banyak perbedaan diantaranya: pakaian perkawinan, *siger* (mahkota) dll.

Ruang lingkup wilayah kepangeranan kesugihan daerah kabupaten diantaranya: sukamarga, jembat beduh, pesisir way peko, way temaga, dimana pangeran yang memegang wilayah tersebut karena secara keseluruhan adanya masyarakat adat pada daerah tersebut.

Peranan adat dalam pemerintahan desa, khususnya desa kesugihan sangat berperan penting di dalamnya, dimana antara kepala desa dan kepala adat

saling adanya koordinasi dalam permasalahan desa.⁸³Tugas dan fungsi adat desa Kesugihan antara lain:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lembaga adat desa Kesugihan memiliki tugas yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dimana dalam membantu berjalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan desa, selain kepala desa lembaga adat pun ikut andil dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berbagai hal mengenai suatu kemajuan desa, atau permasalahan yang berhubungan dengan desa.

2. Membantu menyelesaikan konflik masyarakat.

Tugas dan fungsi lembaga adat selanjutnya yaitu membantu menyelesaikan konflik masyarakat, seperti contoh yang sudah terjadi konflik antar dua desa yang duduk permasalahannya adanya kesalahpahaman antara dua tersebut, sehingga lembaga adat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan melakukan musyawarah bersama dengan kepala desa, dan aparatur desa yang bersangkutan, sehingga terjadi perdamaian antara kedua desa.

3. Melakukan pengawasan terhadap desa.

Tugas dan fungsi dari lembaga adat selanjutnya yaitu melakukan pengawasan terhadap desa, dimana lembaga adat termasuk kepada BPD

⁸³ Wawancara dengan Bapak Azhar Marzuki, Kepala Adat Desa Kesugihan, pada tanggal 02 Desember 2018.

(Badan Pengawasan Desa) yang melakukan pengawasan terhadap desa, baik kinerja terhadap kepala desa, maupun dengan terselenggaranya pembangunan desa, meskipun lembaga adat ini tidak seutuhnya melakukan tugas seperti BPD tetapi, lembaga adat ini ikut andil dalam penyelenggaraan desa.

4. Sebagai tempat mediasi masyarakat desa.

Tugas dan fungsi dari lembaga adat selanjutnya yaitu sebagai tempat mediasi masyarakat desa dimana apabila adanya suatu konflik atau permasalahan masyarakat desa mengenai kesejahteraan masyarakat lembaga adat dapat melakukan mediasi, agar tetap terjalinnya kesejahteraan desa.⁸⁴

Adat istiadat desa kesugihan tidaklah hanya berperan dalam hal perkawinan, dan kebudayaan, tetapi lembaga adat desa pun ikut andil dalam pemerintahan desa, seperti contoh kepala adat ikut menyelesaikan konflik antar desa Kesugihan dan desa Sukaratu, konflik ini terjadi karena adanya selisih paham antara keduanya, sampai adanya koordinasi antara kepala desa dan kepala adat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan mengadakan musyawarah atau mediasi antara dua desa tersebut hingga terjadilah perdamaian antara kedua desa tersebut.⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

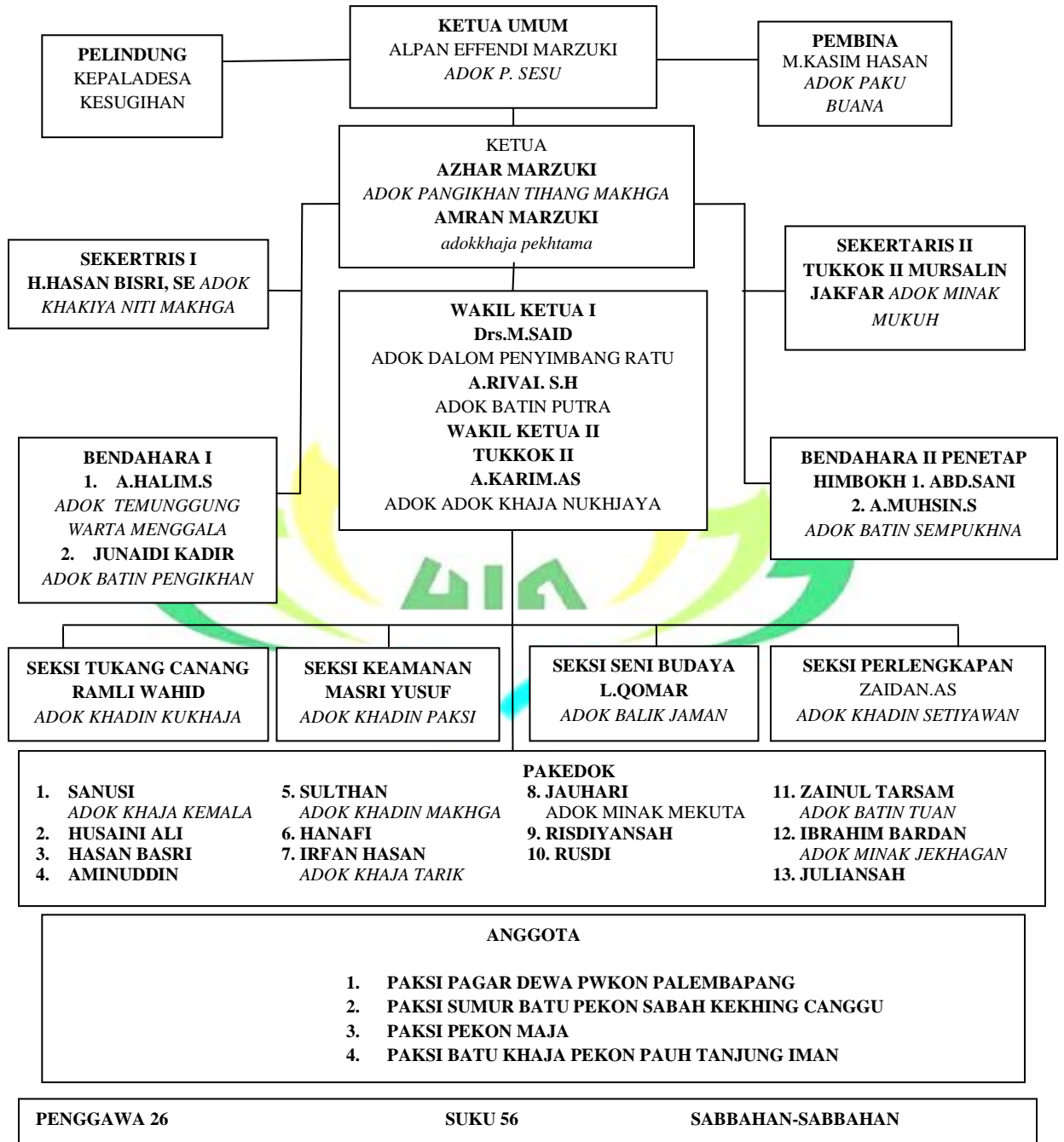
⁸⁵ *Ibid.*

Dalam eksistensinya peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat berperan penting, karena antara kepala desa, aparatur desa dan lembaga adat saling adanya koordinasi dan keterbukaan terhadap jalannya suatu pemerintahan desa⁸⁶. Tidak hanya menampung aspirasi masyarakat, lembaga adat desa kesugihan mencakup ke berbagai instansi, seperti halnya kepala adat desa kesugihan ikut dalam pembakaran dan pemusnahan barang bukti narkoba di Polres Lampung Selatan yang tidak bisa lagi dilakukan melalui mediasi, karena sudah menjadi peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia.



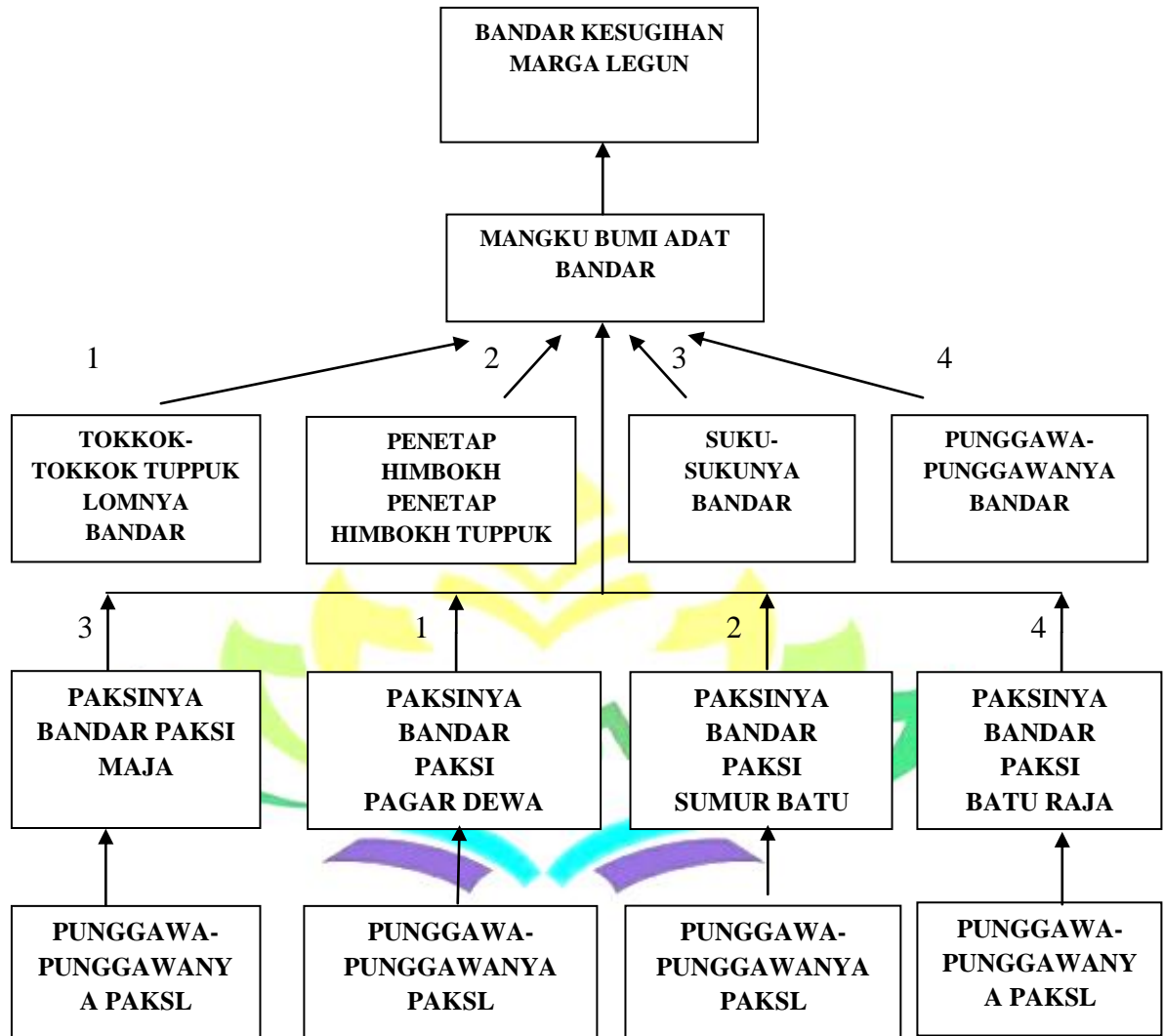
⁸⁶ *Ibid.*

Tabel 3.
Struktur Organisasi Bumi Adat Bandakh Kesugihan Makhga Legun
Kesugihan Kecamatan Kalianda Lampung Selatan



Sumber: Struktur Keorganisasian Lembaga Adat Desa Kesugihan, Kalianda, Lampung Selatan.

SEKEMA PEMERINTAHAN ADAT MARGA



Sumber: Sekema Pemerintahan Adat, Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda

KETERANGAN:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Mangku Bumi Adat | : Laporan Masalah Adat |
| 2. Tukkok-Tukkok | : Laporan Masalah Adat |
| 3. Penetap Himbokh- penetap himbokh | : Laporan Masalah Keagamaan Adat |
| 4. Suku-Suku | : Laporan Masalah Adat |
| 5. Punggawa-Punggawa | : Laporan Masalah Adat |
| 6. Paksi-Paksi | : Laporan Masalah Adat |
| 7. Punggawa-punggawa | : Laporan Masalah Adat |

BAB IV ANALISIS

A. Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam budaya dan adat istiadat, dimana adat istiadat ini harus selalu dijaga dan dilestarikan, berdirinya lembaga adat dapat membantu pemerintah dalam menjaga, melestarikan budaya dan adat istiadat.

Lembaga adat merupakan suatu wadah organisasi yang terbentuk kedalam susunan lembaga dimana didalamnya terdapat struktur kepangeranan. Lembaga adat tidak hanya berperan dalam kebudayaan masyarakat setempat, tetapi lembaga adat ikut berperan dalam pemerintahan desa, berbagai persoalan dan konflik desa tidak hanya diselesaikan oleh kepala desa dan aparatur desa, tetapi lembaga adat ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut, dalam kedudukan di pemerintahan, kepala desa memiliki kedudukan tertinggi dari kepala adat. Akan tetapi adat sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga dalam kemasyarakatan kepala adat memiliki kedudukan tertinggi yang mana seorang kepala adat yang sangat bertanggung jawab terhadap masyarakat adatnya, dan ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada.

Banyak konflik yang terjadi di desa kesugihan, tidak hanya seorang kepala desa yang turun untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, tetapi adanya koordinasi antar kepala desa dengan kepala adat, menurut

penulis hubungan yang terjalin antara kepala desa, kepala adat dan aparatur desa lainnya sangat baik, karena diantaranya mereka selalu menjaga keharmonisan hubungan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya, sehingga berbagai konflik dan permasalahan yang terjadi di desa tersebut dapat dengan mudah terselesaikan.

Menurut penulis peran lembaga adat selain yang telah termaktub dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemeliharaan Budaya Lampung, lembaga adat merupakan suatu sarana mediasi bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, mulai dari perkawinan, masalah adat, budaya dll.

Menurut pengamatan penulis dari penelitian yang telah dilakukan terhadap informan-informan, keseimbangan antara lembaga adat, masyarakat, dan aparatur desa setempat memiliki keseimbangan dalam kemajuan desa, terutama peran dari lembaga adat, keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang telah sesuai dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 pasal 3 dimana lembaga adat memiliki peran, wewenang dan tugas sendiri dalam menjalankan atau membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut penulis dalam menjalankan tugas dan fungsi menurut hukum yang tertulis, lembaga adat seharusnya memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan agar usaha-usaha membantu aparatur desa dalam penyelenggaraan desa dapat terpenuhi mungkin diantaranya:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap adat istiadat setempat, agar selalu terjaganya kesatuan masyarakat desa.
2. Melakukan pensolisasian dan pendekatan kepada masyarakat mengenai adat istiadat.
3. Meningkatkan upaya kelestarian adat istiadat masyarakat setempat.
4. Pengelolaan sebagai jasa mediasi dalam menyelesaikan konflik yang ada.
5. Melakukan pendataan kepada masyarakat dalam rangka menyusun kebijakan dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam pelaksanaannya dalam rangka ikut menyelenggarakan pemerintahan desa menurut penulis kendala-kendala lembaga adat dalam membantu atau ikut serta aparaturnya desa itu sangat minim, sehingga memudahkan lembaga adat dalam melaksanakan tugasnya. Dan menurut penulis keterkaitan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa sudah sesuai dengan peraturan pada BAB IX pasal 14 no 1 dimana hubungan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa itu bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

Menurut pengamatan, koordinasi antara lembaga adat dengan aparaturnya desa sangatlah baik sehingga dapat menumbuhkan dan menanamkan asas-asas dari hukum adat itu tersendiri, mulai dari gotong-royong, rasa sosial, demokrasi, dan menumbuhkan rasa bersama dalam mencapai cita-cita bersama.

Oleh karenanya dalam pengamatan penulis peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah sangat berperan penting didalamnya, karena selalu adanya koordinasi, kerjasama, dan hubungan baik antara aparatur desa, dengan lembaga adat, sehingga memudahkan lembaga adat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun tidak semua dalam hal urusan pemerintahan desa lembaga ikut andil, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang mana lembaga adat tidak bisa ikut serta didalamnya, karena bukan ranah atau bagian dari lembaga adat.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Adat merupakan istilah dari bahasa arab yang berarti kebiasaan, adat istiadat sudah ada sejak zaman pra Islam dimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam hal keseharian, budaya ataupun keagamaan, dimana kebiasaan pada saat pra Islam adanya kebiasaan-kebiasaan yang dapat dikatakan sebuah kegiatan yang menduakan tuhan, berjudi, mabuk-mabukan, bahkan menyembah berhala yang diyakini sebagai tuhannya. Seperti dan dalam perkembangannya ada istilah *Urf* yaitu adat istiadat yang mana adat istiadat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis.

Dalam metode hukum Islam dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada titik temunya para ahli boleh berijtihad dalam menetapkan hukum, agar dapat menemukan titik terang dalam menyelesaikan masalah

tersebut. Dimana dalam kondisi saat ini khususnya didesa Kesugihan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat, yang tidak menemui titik terang, kepala adat dan kepala desa melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum yang tidak keluar dari syariat Islam agar terselesainya suatu permasalahan yang ada.

Dalam Islam *ahlul halli wal aqdi* merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat dimana selain bertugas dikenegeraan tetapi lembaga adat juga bertugas melakukan pengawasan dimana seperti halnya dengan tugas BPD (Badan Pengawasan Desa), dalam tingkat desa lembaga adat dapat digolongkan sebagai *ahlul halli wal aqdi* karena memiliki tugas terhadap pengawasan, tetapi lembaga adat dapat melakukan pengawasan ditingkat desa, karena lembaga adat termasuk dengan BPD desa Kesugihan, yang terdapat tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, dan aparatur desa yang melakukan tugas penyeimbang, pengawasan terhadap desa, jika *ahlul halli wal aqdi* sebagai dewan perwakilan rakyat tetapi lembaga adat sebagai dewan perwakilan desa, yang bertugas melakukan pengawasan di desa, jika dalam konteks Islam yang berwenang melakukan pengawasan adalah *ahlul halli wal aqdi* dan dalam konteks tingkat desa yang melakukan tugas desa adalah BPD atau lembaga adat desa.

Agama Islam merupakan agama rahmata lil alamin, dimana agama Islam agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia termasuk adat istiadat, sehingga kebiasaan yang sudah menjamur dikehidupan

masyarakat tetap berada dalam syariat Islam, lembaga adat desa kesugihan dalam perkembangannya dan tuntunannya masih sesuai dan sejalur dengan agama, yakni agama Islam, dimana para aparatur adat selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai agama dalam kehidupan keseharian.

Adat istiadat suatu kebiasaan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, tidak adanya larangan melestarikan adat istiadat dalam Al-Quran, bahkan adat istiadat bisa tetap dilestarikan asal tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadist. Adanya Lembaga Adat merupakan suatu wadah untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada dan terpeliharanya kebhinekaan dalam suatu negara dan membantu para aparatur desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Dimana agama Islam mengajarkan kepada para umatnya untuk saling membantu dan tolong menolong dalam hal apapun sesuai prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang telah mengatur dan menjadi pedoman bagi umatnya dalam bermasyarakat.

Agama Islam tidak memberatkan umatnya untuk melestarikan atau mengikuti adat istiadat, adat istiadat desa kesugihan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan, adanya syariat Islam tidak menyulitkan atau menyudutkan masyarakat untuk tetap menjaga adat istiadat setempat, bahkan adanya lembaga adat sangat membantu masyarakat agar tertampungnya semua aspirasi masyarakat baik yang umum maupun yang berkenaan dengan adat istiadat.

Jadi selama adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat Islam, Allah SWT berfirman didalam al-Quran memerintahkan kepada umatnya untuk memeluk agama Islam secara kaffah dimana umat Islam tidak hanya melakukan hablumminallah tetapi juga hendaknya melakukan habblumminnas, dimana lembaga adat dalam kacamata Islam merupakan suatu lembaga yang dapat membantu lembaga-lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan program-program yang telah dibuat, demi tercapainya suatu visi misi desa dalam rangka kemashlahatan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir penulisan ini, dimana penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelaah peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berhasil disampaikan di atas maka dapat penulis simpulkan:

1. Dalam menjalankan peran, dan tugasnya berdasarkan PERDA provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Lembaga Adat yang telah tertuang didalamnya, meskipun lembaga adat tidak selalu ikut andil didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena antara lembaga adat dengan pemerintahan desa memiliki kendali masing-masing didalamnya yang mana dalam menjalankan program pemerintahan desa, kepala desa selalu mengkoordinasi dengan kepala adat desa kesugihan, sehingga meminialisir adanya konflik atau selisih paham antara lembaga adat dengan aparatur pemerintah desa. dan menghindari kendala-kendala yang memungkinkan terjadi dalam menjalankan program-program penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga adat di desa kesugihan sudah ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 tentang peran lembaga adat.

2. Dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam peranannya lembaga adat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam, agama Islam merupakan agama yang universal dimana tidak menyulitkan umatnya dalam bersosialisasi, termasuk dengan lembaga adat yang memiliki peranan penting di desa kesugihan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melestarikan adat istiadat setempat, karena adat istiadat dalam islam boleh tetap dijaga dan dilestarikan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam yakni al-Quran dan hadist. Yang mana tujuan dari lembaga adat itu sendiri selain menjaga dan melestarikan adat istiadat, tetapi lembaga adat berdiri karena untuk kemshlahat masyarakat, yang mana dalam agama Islam di perbolehkan agar tidak terjadi kemudharatan.

B. Rekomendasi

Bedasarkan hasil penyusunan skripsi maka disarankan antara lain:

1. Kepada pemangku adat agar perlu adanya koordinasi penuh antara para pemangku adat dengan pemerintah desa atau dalam hal ini para aparatur adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, demi terwujudnya visi dan misi desa.
2. Kepada masyarakat khususnya pemuda-pemudi desa Kesugihan untuk ikut serta aktif dalam kegiatan desa, hal ini dalam rangka menjaga dan melestarikan adat istiadat setempat, agar ada kaderisasi kedepan dalam rangka menjaga dan melestarikan adat istiadat.

3. Kepada pemerintah desa atau dalam hal ini para aparatur desa Perlu adanya peningkatan sarana prasarana dalam menunjang lembaga adat dalam menjalankan program-program, baik menjalankan program lembaga adat maupun dalam membantu aparatur desa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam saran-saran tersebut, penulis mengharapkan semoga hasil dari laporan penulis di tugas akhir ini dapat menjadi sumbangan ilmu bagi fakultas syari'ah pada umumnya dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- A, Suriyaman, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan akan Datang*, Jakarta: PrenadaMedia, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali dkk, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Amiridin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.
- Al-Imam Abiy Zakariya Yahya Ibnu Syarif Al-Nawawiy Al-Damasyqiy, Syeikh Shahih Muslim, di kutip oleh Imad Zakiy Al-Barudiy, Juz. XII, Mesir: Al-Maktabah Al-Thufiqiyyah, 2008
- Alwi Hasan, Sugono Dedi, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pelita III, 1982/1983.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Firman Sujadi, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016.

Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2014.

HAW.Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang aseli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Hasani Ahmad Syamsuri, " *Ijtihad Dan Sekularisasi: Telisik atas Tradisi Keilmuan Islam dan Barat* ", *al- 'adalah* Vol. X, No. 2 Juli 2011

Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Jakarta: Alumni Bandung, 1981.

Ilmar Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Khairuddin Tahmid, *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Seksi penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2004.

Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'I*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

M.Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Muhammad Abdul Khadir, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.

Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Moh Riva'I, *Ushul Fiqih*, Bandung: Alma' Arif, 1995.
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, Lampung: Seksi Penerbitan fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Nugraha G.setya, R Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- R. Soerojo Wignojodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1983.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 2008.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Tika Mohammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sabaruddin sa, *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pemerintahan-Adat Istiadat-Sastra-Bahasa*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau.
- Sarman, Makarao Mohammad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta 2011.
- siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 2008.
- Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet, 2007.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

Zuhraini, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Harakindo publishing, 2014.

<http://al-ulama.net/kelembagaan-ahlul-halli-wal-aqdi/.htm> (12 April 216).



PANDUAN WAWANCARA

Responden: Kepala Adat Desa Kesugihan

1. Identitas Responden

- a. Nama : Azhar Marzuki
- b. Pekerjaan : Kepala Adat desa Kesugihan
- c. Alamat : Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Kab. Lampung Selatan

2. Daftar Pertanyaan

- a. Mohon bapak jelaskan bagaimana peran lembaga adat dalam keikutsertaan penyelenggaraan pemerintahan desa?
- b. Mohon bapak jelaskan apakah program dari lembaga adat sudah berjalan dengan baik sesuai penyelenggaraan pemerintahan desa?
- c. Mohon bapak jelaskan apakah antara struktur lembaga adat dan aparatur pemerintahan desa saling koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
- d. Mohon bapak jelaskan bagaimana hubungan lembaga adat dengan aparatur desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa?

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Kepala Desa, Desa Kesugihan

1. Identitas Responden

- a. Nama : Mukhlisin
- b. Pekerjaan : Kepala Desa, Desa Kesugihan
- c. Alamat : Desa Kesugihan, kecamatan Kalianda, Kab. Lampung Selatan

2. Daftar Pertanyaan

- a. Mohon bapak jelaskan apakah lembaga adat didesa Kesugihan ini sudah ikut berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan desa?
- b. Mohon bapak jelaskan bagaimana hubungan antara lembaga adat dengan aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik dalam terselenggaranya program pemerintahan ataupun hubungan koordinasi?